



**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2023**

**Jl. Teuku Umar Rt. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian
Tarakan Tengah Kalimantan Utara**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Tarakan, Juni 2023

Kepala Dinas

A R B A I N, SE, M. AP

PEMBINA UTAMA MUDA / IVc

NIP. 19660616 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	6
1.4.Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	9
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	25
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	53
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	76
4.1.Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	76
4.2.Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	76
BAB V PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022	11
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	27
Tabel 3 Review Rencana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024	38
Tabel 4 Daftar Usulan (Aspirasi) Masyarakat Dinas Sosial dan Pemeberdayaan Masyarakat Tahun 2024	51
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	59
Tabel 6 Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 204	62
Tabel 7 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dam Sub Kegiatan Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	66
Tabel 8 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

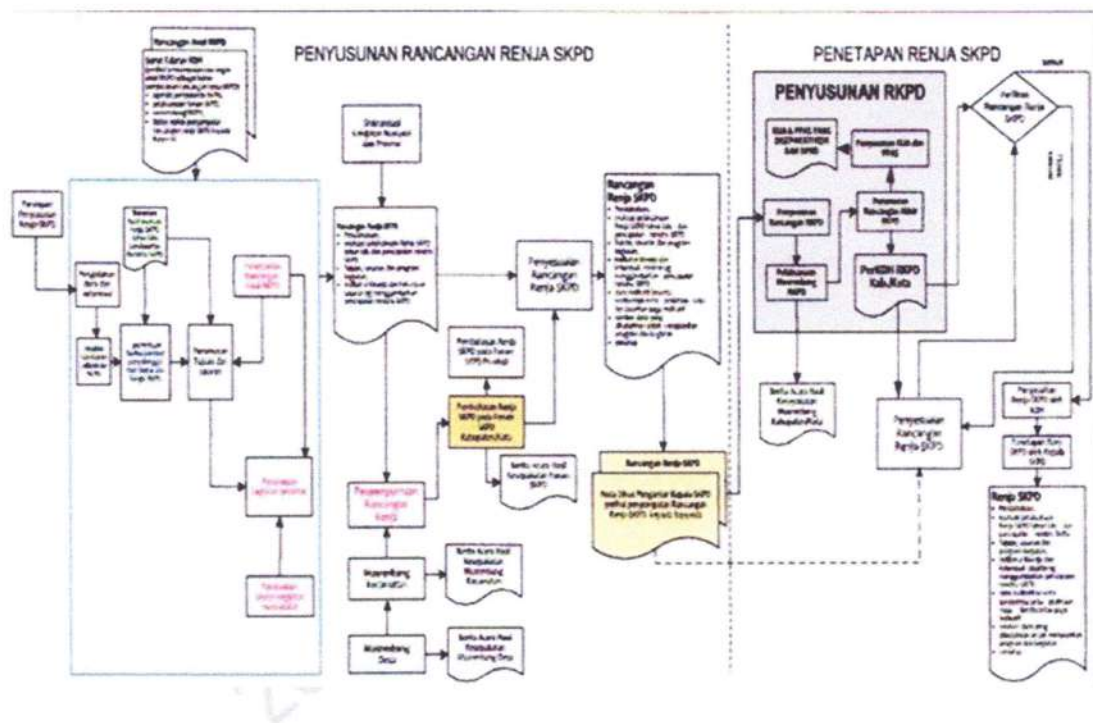
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 - 2024, dimana tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke lima dalam periode Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 yang di arahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/06/BAPPEDA LITBANG tanggal 06 Januari 2023 tentang Persiapan Penyusunan Ranwal RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan 2024.

Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disusun berdasarkan :

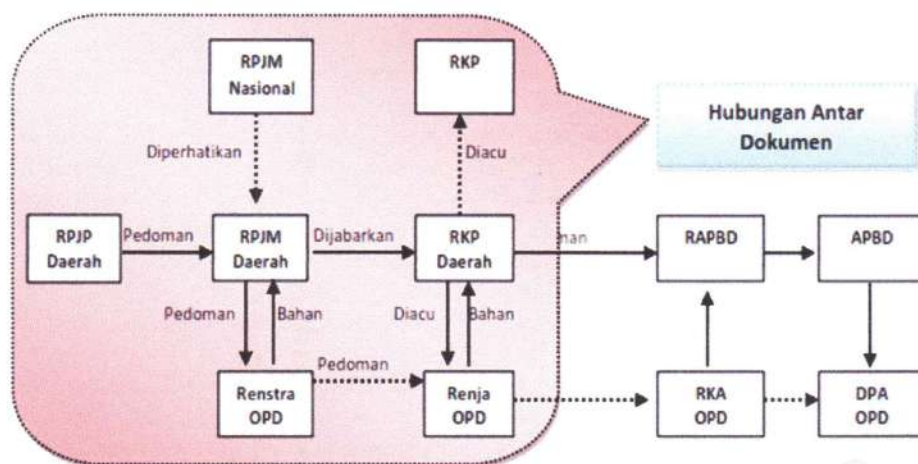
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/5889/2021 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
28. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2024;
2. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2024;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, review terhadap rancangan RKPD Tahun 2024 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2022), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 (Delapan) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.176.219.306,-** dengan realisasi sebesar **Rp.4.958.785.649,- atau 95,80%.**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	90,42%	100%	95,80%	95,80%	100%	286,22	2,86
1.06.01.2.02	AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100 %	4 Layanan	12	3
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	25 Orang	26 Orang	26 Orang	100,00 %	312 Orang/bulan	363	13,96 %
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Orang	10 Orang	10 Orang	8 Orang	80,00 %	4 Dokumen	22	2,2%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100 %	5 Layanan	15	3%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Jenis	51 item	95 item	95 item	100 %	1 Paket	147	2,94%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	390,320 Jenis/710 item	688 item	593 item	593 item	100 %	2 Paket	1.283	1,81 %
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38000 Lembar	38000 Lembar	30.091 Lembar	30.089 Lembar	99,99 %	2 Paket	68.091	1,79%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10 Kali	11 Kali	11 Kali	100,00 %	4 Laporan	25	6,25%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 Jenis	5 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6 Jenis	17	2,83%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/S ub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegi atan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	-	-	-	8 Unit	18	3%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100 %	5 Layanan	15	3%	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Lembar	180 Lembar	180 Lembar	100%	1 Laporan	361	2%	
1.06.01.2.08.02	PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	36	3%	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	59 Unit	33 Unit	32 Unit	96,97%	58 Unit	149	2,52%
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	8 Unit	7 Unit	87,50 %	10 Unit	27	2,7%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2%	8 Unit	24	3%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	18 Unit	75	1,87%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Program/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	100%	-	-	-	100%		
1.06.02.2.03	Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	25 Orang		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 kegiatan	-	-	-	35 Orang	36 Orang	18%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pantl Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	88,28%	88,28%	100%	288,28%	2,88%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	335 Orang	335 Orang	305 Orang	265 Orang	85,33 %	335 Orang	935	9,35%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	105 Orang	200 Orang / Kali	200 Orang / Kali	100 %	200 Orang	505	2,52%
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mencrima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	200 Orang	200 Orang	-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	17 Orang / Kali	17 Orang / Kali	100,00 %	41 Orang	58	1,16%

1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	7 Orang	25 Orang / Kali	18 Orang / Kali	72,00 %	25 Orang	50	2%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang / Kali	30 Orang / Kali	100,00 %	30 Orang	90	3%
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 layanan	-	-	-	-	30 Orang	30	1%
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	7 Orang	7	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-	100%			100%		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	0 Dokumen	2.500 layanan	2.461 layanan	98,44 %	2500 Orang	4.961	1,98%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Target s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	80%	-	80%	-	-	82%	-	-		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	-	12500 KPM	-	-	12550 KPM	-	-		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 KPM	1.503 KPM	12.500 KPM	10.351 KPM	82,81%	10000 Orang	21.854 Orang	2,18 %		
1.06.05.2.02.03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3073 KPM	8246 KPM	3.073 KPM	3.073 KPM	100,00 %	7043 Keluarga	18.362 Keluarga	5,97%		
1.06.05.2.02.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.460 KPM	775 KPM	9.460 KPM	9.460 KPM	100 %	9.460 Orang	19.695 Orang	2,08%		
1.06.01.2.06	PROGRAM PEMANGKAPAN BENCAHA	Persentase layanan penangananan bencana alam dan sosial	100%	-	100%	-	-	100%	-	-		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	-	100%	-	-	100%	-	-		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 KK	2 KK	298 KK	298 KK	100 %	298 Orang	598 Orang	2,01%		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	1 TMP	-	1 TMP	-	-	100%	-	-		

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan/Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	1 TMP	25	2,08%	
2.013.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	Cepat Berkembang	-	Cepat Berkembang	-	-	Cepat Berkembang	-	-	
2.13.04.2.01.0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	-	20 Kelurahan	-	-	20 Kelurahan	-	-	
2.13.04.2.01.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Kelurahan	20 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100 %	1 Dokumen	25	2,98	
2.013.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan MasyarakatHukum Adat yang MasyarakatPelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organsiasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	-	76 Lembaga	-	-	76 Lembaga	-	-	
2.13.05.2.01.03	PeningkatanKapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	76 Lembaga	228 Lembaga	76 Lembaga	75 Lembaga	98,68 %	76 Lembaga	379	4,99%	

	Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit Rehab 10 Unit Sarpras		10 Unit Sarpras	10 Unit Sarpras	100%	7 Unit	17	1,7%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8 Alat		8 Alat	7 Alat	87,50%	1 Laporan	8	1%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	3 Dokumen	53	2,12%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Rehabilitasi Sosial 88,27%. Dengan dukungan kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan permakanan dan alat bantu serta Reunifikasi keluarga masih dalam proses tergantung pada laporan pihak terkait dengan dilakukannya data verifikasi dan validasi data terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Bahwa dalam Kegiatan ini telah dilaksanakan melalui program Sistem Layanan Rujukan Terpadu melalui pengaduan dan pendataan bagi PMKS diluar panti sebanyak 2.495 layanan.

Adapun Jenis layanan program di rehabilitasi sosial antara lain adalah :

- (1). Penanganan anak terlantar dan adapsi.
- (2). Pengiriman orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.
- (3).Layanan rujukan penanganan lanjut usia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar.
- (4).Penyediaan permakanan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusia terlantar, dan gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.

- (5). Pelayanan data dan pengaduan.
- (6). Penyediaan sandang untuk diserahkan kepada masyarakat.
- (7). Pemberian layanan alat bantu kursi roda, alat bantu dengar, kaca mata kir, dan tongkat kruk ketiak
- (8). Pemberian layanan reunifikasi keluarga.

Kegiatan program Rehabilitasi Sosial yaitu :

- (1). Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial melalui penyedia permakanan, penyediaan alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- (2). Penanganan rujukan lanjut usia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar ke Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA), dan RSUD dr. Jusuf SK

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 82,39 %, Dengan dukungan kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat data dilapangan dan laporan pihak terkait dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data terhadap fakir miskin di kota Tarakan, namun untuk kegiatan rapat koordinasi belum maksimal dikarenakan adanya jadwal dimasing-masing perangkat daerah dalam satu SK perubahan atas lampiran keputusan Wali Kota Nomor : 460 HK/VIII/352/2022 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Indikator Kemiskinan di Kota Tarakan

dan masih adanya pembahasan mengenai indikator kemiskinan tingkat kota yang perlu di kaji ulang untuk ditetapkan oleh kepala daerah.

Adapun jenis layanan yang diberikan terhadap perlindungan dan jaminan sosial, yaitu;

- (1). Pemberian bantuan logistik penanganan bencana alam dan social masyarakat yang bersumber anggaran APBD dan Kementrian Sosial RI
- (2). Memfasilitasi klien peserta BPJS mandiri menunggak/tidak mampu/sakit untuk menjadi peseta BPJS PBI Pemerintah Daerah Kota Tarakan.

Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota melalui pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi bantuan Sosial kesejahteraan keluarga, dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
- (2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota melalui penyediaan makanan yang bersumber anggaran APBD dan permakanan anak (Biskuit) dan makanan siap saji dari Kementrian Sosial RI.

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Adapun Capaian Realisasi Program Penangan Bencana sebesar 100 % Dengan dukungan kegiatan :

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial terhadap korban bencana alam dan social di Kota Tarakan dengan jumlah penyintas sebanyak 25 jiwa dari jumlah

penyintas sebanyak 82 jiwa sehingga kegiatan permakanaan tidak terealisasi dan program penanganan bencana alam dan sosial ada beberapa korban tinggal di tempat keluarganya sehingga terkait permakanaan ditanggung keluarganya. sedangkan penyintas yang lainnya diberikan berupa sandang, bantuan santunan bagi korban yang meninggal dunia diberikan uang tunai dengan anggaran dari kementerian Sosial berdasarkan hasil asesmen perugas TAGANA.

Tahun 2022 Bencana Sosial / Kebakaran sebanyak 82 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, Bencana alam sebanyak 65 Jiwa (asal bencana terjadinya angin kencang yang dialami sebanyak 10 Jiwa dan korban tanah longsor dialami sebanyak 55 jiwa). Adapun titik lokasi kejadian bencana kebakaran berada pada daerah pantai amal, lokasi bencana alam angin kencang yang terjadi pada tanggal 9 juli 2022 terjadi di daerah pamusian sedangkan musibah tanah longsor terjadi di beberapa lokasi yaitu di daerah Mamburungan, Kampung IV, Karang Harapan, Karang Anyar, Selumit, Sebengkok dan Lingkas Ujung.

4. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Adapun Capaian Realisasi Program Taman Makam Pahlawan sebesar 100 % Dengan dukungan kegiatan :

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala yang mencapai realisasi sebesar 100 %.

Adapun jenis layanan yang diberikan terhadap pemberdayaan sosial, yaitu;

- (1). Pengaduan Masyarakat terkait tidak menerima bantuan dikarenakan telah dihapus dari kementrian.

(2). Pengaduan masyarakat terkait NIK yang tidak up date, keluarga meninggal masih ada datanya tersimpan didalam database/tidak terhapus.

(3). Pindah alamat tempat tinggal yang tidak terkonfirmasi.

Kegiatannya adalah sebagai berikut :

(3) Pendataan Verifikasi dan Validasi (Verval) data penerima bantuan

(4) Koordinasi lintas sector dengan PT. Pos, BNI dan Lurah Se Kota Tarakan terkait pengaduan bantuan dan data penerima bantuan.

(5) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMP).

5. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Adapun Capaian Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 91,62% Dengan dukungan kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dimana kegiatan ini dilaksanakan pada pada Tahun 2022.

Pelaksanaan lomba Kelurahan juara I (satu) di Tingkat Provinsi dan mewakili di Tingkat Nasional.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar 99,68 % hingga saat ini.

Dengan dukungan kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan; Fasilitasi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang telah terealisasi sebesar 100%, dan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun Capaian Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dengan capaian Realisasi sebesar 96,09%

Dengan dukungan kegiatan :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yg terealisasi sebesar 96,08 %, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 93,42 %

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar 97,84 %, Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 95,65 %, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 93,97 % dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 96,41%

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar 100,00% dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 98,92 %;

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar 86,51 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 94,95 % dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 100 %

Dan Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Keterbatasan jumlah tenaga Sumber Daya manusia mengakibatkan petugas merangkap lebih dari satu program kegiatan.
2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia melalui diklat maupun workshop.
3. Keterbatasan anggaran program kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
5. Ketersediaan data terkait bantuan sosial masih kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kementarian sosial, meskipun kota/kabupaten sudah mengupayakan pengusulan dan penghapusan data ke pemerintah pusat
6. Adanya Asumsi masyarakat bahwa kepengurusan bantuan Sosial dianggap ribet dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan lama sehingga proses pengurusan cenderung masih melibatkan jasa pihak ketiga.

7. Pelayanan Masyarakat Kota Tarakan menggunakan layanan Online dengan menggunakan *whatsApp* akan tetapi tidak semua juga warga masyarakat mengerti untuk mengakses melalui online sebab masih ada masyarakat yang belum memiliki smartphone atau mereka yang belum familiar dengan pelayanan online, sehingga kami tetap melayani dan membantu mereka secara langsung.
8. Kegiatan program Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, belum ada peraturan/kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman untuk menentukan Lembaga Adat.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN.

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan evaluasi capaian target kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara

umum sampai dengan tahun 2022 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial serta data perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS di Kota Tarakan, sehingga menghambat kinerja aparaturnya dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 2** berikut ini :

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	74,25	76	78	80	82	84	80,99	131,57	96,80	82	84		
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

[illegible]

	Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG)																	
9	Nilai SAKIP	-	62,00 / B	64,00 / B	66,00 / B	70,00 / B	72,00 / B	-	60.53 / B	-	-	-						

Capain Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang di analisisa merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial.

Berdasarkan Laporan Data, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial Semester I Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan adalah 1.303 KPM, Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH sebanyak 3.073 KPM dan Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT adalah sebanyak 274 KPM sehingga Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 131,57,% yang di sebabkan karena adanya bantuan pandemic Covid 19 yang direncanakan Th 2020 dan terealisasi pada Th 2021, sedangkan di Th 2022 mengalami penurunan dikarenakan sudah tidak disalurkan nya bantuan untuk pandemi covid 19.

2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan Laporan Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan yang sesuai standar) Semester I adalah 200 Orang, Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket alat bantu sebanyak 17 Orang, Jumlah layanan Reufikasi Keluarga sebanyak 25 Orang, Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan, anak cacat dan anak nakal sebanyak 30 Orang dan Jumlah Layanan data dan pengaduan sebanyak 2.500 layanan sehingga Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar

panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun 2022 capaiannya sama besar dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100% yang dikarenakan pelaksanaannya tepat sasaran.

3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

Berdasarkan Laporan Data laporan, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan adalah 298 KK sehingga Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah pada Tahun 2022 capaiannya sama besar dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100% yang dikarenakan pelaksanaannya tepat sasaran.

4. Presentase pengelolaan TMP.

Berdasarkan Laporan Data, Presentase pengelolaan TMP sebanyak 12 Bulan sehingga Persentase pengelolaan TMP pada Tahun 2022 capaiannya sama besar dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100% yang dikarenakan pelaksanaannya tepat sasaran .

5. Persentase PSKS Yang Terlatih.

Berdasarkan Renja Skpd Th 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tidak melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial yang merupakan indikator Persentase PSKS Yang Terlatih.

6. Persentase penerbitan izin dan rekomendasi.

Berdasarkan Renja Skpd Th 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota melaksanakan Program PEMBERDAYAAN SOSIAL yang merupakan indikator Persentase penerbitan izin dan rekomendasi sehingga Persentase penerbitan izin dan rekomendasi pada Tahun 2022 capaiannya sebesar 100% Tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebesar 75%.

7. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.

Berdasarkan Laporan Data, Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi

sebesar 98,68% pada Tahun 2022 capaiannya hamir sama dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

8. Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG).

Berdasarkan Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG), adalah sebesar 87,50% yang meliputi 30 Orgaisasi Perangkat Daerah dan Jumlah Orgaisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Tarakan, sehingga Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG) pada Tahun 2022 capaiannya hampir mencapai besaran target 100%.

9. Nilai SAKIP.

Berdasarkan Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 Nilai SAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah 60,52 dengan Kategori Baik.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Isu-Isu Strategis yang menjadi Prioritas bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Menuju Kota Inklusif Disabilitas Hal ini mengacu pada :

- UU No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

- PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP ini memiliki perjalanan yang cukup panjang, untuk dapat meyakinkan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Akomodasi yang Layak, tidak seperti selama ini.

3. Percepatan penurunan angka Stunting

Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penrunan stunting, Perpres nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Angka stunting di tingkat Kota Tarakan pada Tahun 2023 adalah 15 % dan diupayakan pada Tahun 2024 menjadi 14 %. Dalam tim percepatan penurunan stunting Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

3.1. Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting yaitu pembentukan kader percepatan penurunan stunting di setiap Kelurahan yang selanjutnya melatih, membina, dan monitoring evaluasi.

- 3.2. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi. Yang sudah dilakukan sebanyak 36,16 % di Kelurahan Karang Harapan, Karang Anyar, Selumit Pantai, Mamburungan, Juata Laut, Juata Kerikil, dan Juata Permai.
- 3.3. KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (Baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur dengan sasaran 343 KPM yang sudah dilakukan 23,23 %.
- 3.4. Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat dengan sasaran 4446 KPM PUS miskin yang sudah dilakukan 33,91 %.
- 3.5. Pasangan usia subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah sosial yang menerima bantuan non tunai bersyarat dengan sasaran 3514 KPM PUS miskin yang sudah dilakukan 33,43 %
- 3.6. Pasangan Usia subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan (PBI) jaminan kesehatan dengan sasaran 100 %

4. Shelter

Adalah rumah singgah sementara untuk orang terlantar yang akan dipulangkan ke daerah asal. Orang terlantar tersebut biasanya tinggal sementara selama 7 hari sampai dengan 14 hari atau lebih tergantung dengan tergantung situasinya.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
- b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparaturnya untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi.
- b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- c. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Ancaman

- a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;
- b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;
- c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi;

- d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan Rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada **Tabel 3** di bawah ini :

TABEL 3
REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANALISA KEBUTUHAN		Ketera ngan
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp.)		Indikator Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(4)	(5)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	6.	..			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4,197,049,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		4,455,445,985	
1	6.	01	.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3,755,049,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,926,440,000	
1	6.	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	0 Dokume n	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokume n	-	
1	6.	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	0 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		

1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2,500,000	
1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	48,919,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	48,919,000	
1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	17,600,000	
1	6.	01	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	21,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	21,000,000	
1	6.	01	2.0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 Jenis	35,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis	35,000,000	
1	6.	01	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	35,000,000	
1	6.	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	86,300,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	93,700,000	
1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,800,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,800,000	

1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	91,900,000	
1	6.	01	2.0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	92,409,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Unit	272,000,000	
1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	3,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	3,000,000	
1	6.	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	56,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	59,000,000	
1	6.	01	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	40 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	10,000,000	
1	6.	01	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23,409,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200,000,000	

1	6.	02	2.0	0	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	-	Program Pemberdayaan Sosial	100%	99,836,740	
1	6.	02	2.0		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 izin	-	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 izin	-	
1	6.	02	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen		
1	6.	02	2.0		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	0 Orang	-	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	99,836,740	
1	6.	02	2.0	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	99,836,740	

1	6.	04	.		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	200,000,000	Program Rehabilitasi Sosial	100%	199,433,770	
1	6.	04	2.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	335 Orang	150,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	335 Orang	177,453,130	
1	6.	04	2.0	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50,000,000	Penyediaan Permakanan	200 Orang	50,000,000	

1	6.	04	2.0	0	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		Penyediaan sandang	10 Orang	8,000,000	
.	.	.	1.	2								
1	6.	04	2.0	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	50 Orang	59,665,500	
.	.	.	1.	3								
1	6.	04	2.0	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	25 Orang	29,994,160	
.	.	.	1.	4								
1	6.	04	2.0	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30 Orang	9,996,330	
.	.	.	1.	5								
1	6.	04	2.0	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	30 Orang	10,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang	9,987,140	
.	.	.	1.	0								

					Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6.	04	2.0	1	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	9,810,000	
1	6.	04	2.0		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	50,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	21,980,640	
1	6.	04	2.0	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	50,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2500 Orang	21,980,640	
1	6.	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	80%	115,000,000	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	80%	102,784,920	
1	6.	05	2.0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	115,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12550 KPM	102,784,920	

1	6.	05	2.0	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	75,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10000 Orang	46,199,740	
1	6.	05	2.0	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3073 Keluarga	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3073 Keluarga	36,600,000	
1	6.	05	2.0	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460 Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	9460 Orang	19,985,180	
1	6.	06	2.0	0	Program Penanganan Bencana	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	50,000,000	Program Penanganan Bencana	100%	50,000,000	
1	6.	06	2.0	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	50,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	50,000,000	

1	6.	06	2.0	0	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	50,000,000	Penyediaan Makanan	298 Orang	50,000,000	
1	6.	07	1.	1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	77,000,000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	76,950,555	
1	6.	07	2.0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	77,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 TMP	76,950,555	
1	6.	07	2.0	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	77,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	76,950,555	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	1	...			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			871,931,596	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2,281,327,980	

2	1	.4.	.		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori Kelurahan	Cepat Berkembang	25,000,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cepat Berkembang	43,885,970	
2	1	.4.	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	25,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20 Kelurahan	43,885,970	
2	3	1.										
2	1	.4.	2.0	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	43,885,970	
2	3	1.		8								
2	1	.5.	.		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	846,931,596	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	2,237,442,010	
2	3	1.	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	846,931,596	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	76 Lembaga	2,237,442,010	
2	1	.5.	1.									
2	3	1.										

2	1	.5.	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	49,689,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	76 Lembaga	284,689,070	
2	1	.5.	2.0	0	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	75,000,000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25 Unit	865,000,000	
2	1	.5.	2.0	0	Fasilitasi Usaha Ekonomi pengembnagan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25,000,000	

2	1	.5.	2.0	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	25,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	62,752,940	
3			1.	6								
2	1	.5.	2.0	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	672,242,596	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1,000,000,000	
3			1.	9								
											6,736,773,965	

2.1 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2024 melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 4** dibawah ini :

Tabel 4
DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKA TAHUN 2024

No	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran volume	Pagu (Rp)	Catatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
1	Rehab/Perbaikan Gedung Posyandu Balita Cempaka Putih dan Posyandu Lansia Karisma Nakasia	RT. 43 Kelurahan Karang Anyar		1 bangunan	30,000,000	Di Akomodir
2	Rehab Posyandu	RT. 11 Kelurahan		1 Bangunan	50,000,000	Di Akomodir

		Juata Permai				
3	Siring bagian belakang	RT. 11 Kelurah an Juata Permai		Panjang 60 meter	100,000,00 0	Di Akomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, Rancangan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2024 merupakan tahun kelima pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2024

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMD Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan

menghasilkan stabilitas diberbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2030). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2024-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2030.

Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2030 melalui :

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan gas remisi rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah khususnya pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka sasaran program prioritas yang mendukung terhadap sasaran Pembangunan Nasional disampaikan sebagai berikut : (DIPILIH SESUAI SASARAN PD)

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut :

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi, (c) Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita, (e) Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) Insidensi tuberkulosis, (g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA : Sains, (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) Harapan lama sekolah.
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong (a) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing mendorong (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (c) jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke world class university Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class University Top 500, dan (f) Peringkat Global Innovation Index.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut :

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong, (a) Indeks Capaian Revolusi mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama.
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kriteria dengan mendorong Nilai Budaya Literasi.

B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun ketiga. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 mengusung tema :

**“Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai
Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”**

Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi: (1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan

pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) industri ketenagalistrikan; (4) industri perdagangan dan jasa; (5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. Karena, industri-industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama lima tahun.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.

Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan Indikator sebagai berikut :
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social
2. Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti. Dengan Indikator sebagai berikut :
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
3. Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial. Dengan Indikator sebagai berikut :
Persentase Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhiya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.
4. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Dengan Indikator sebagai berikut:
Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator sebagai berikut :
Nilai / Predikat SAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Tahun 2023
Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET AWAL RENSTRA	2024
Meningkatnya kualitas kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	74,25	84,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100,00	100,00
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pengelolaan TMP	100,00	100,00
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan social	Persentase PSKS Yang Terlatih	41,00	75,00
			Persentase pemberian izin dan rekomendasi	100,00	100,00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100,00
			Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyanteK, pengal dan pelaku teknologi tepat guna (TTG)	55,00	75,00
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Persentase tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	-	72,00 / B

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 6** adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2024

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS PROVINSI	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	KET	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permukiman	50,000,000.00		
2	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	8,000,000.00		

3	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	59,665,500.00	
4	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29,994,160.00	
5	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9,996,330.00	
6	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	9,987,140.00	

7	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	9,810,000.00	
8	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	21,980,640.00	
9	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46,199,740.00	
10	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0003 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	36,600,000.00	
11	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19,985,180.00	

12	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	50,000,000.00	
----	----	---	---	--	--------------------------------------	---	--	---------------	--

Tabel 7
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		DinsosPM		4.455.445.985				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		DinsosPM		4.455.445.985	APBD			
1	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penujang Perangkat Daerah Yang terpenuhi	DinsosPM	100%	3.926.440.000	APBD			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	DinsosPM	0 Dokumen					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	DinsosPM	0 Laporan					

1	6	01	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/ BMD yang diadakan	DinsosPM	6 Jenis	35,000,000				
1	6	01	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DinsosPM	6 Unit	35,000,000				
1	6	01	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	DinsosPM	5 Layanan	93,700,000				
1	6	01	2.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DinsosPM	1 Laporan	1,800,000				
1	6	01	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DinsosPM	12 Laporan	91,900,000				
1	6	01	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/ BMD yang dipelihara	DinsosPM	59 Unit	272,000,000				
1	6	01	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DinsosPM	10 Unit	3,000,000				
1	6	01	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DinsosPM	8 Unit	59,000,000				

1	6	01	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DinsosPM	16 Unit	10,000,000				
1	6	01	2.09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	DinsosPM	1 Unit	200,000,000				
1	6	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	DinsosPM	100 %	99,836,740				
1	6	02	2.02.		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	DinsosPM	0 Izin					
1	6	02	2.02.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DinsosPM	0 Dokumen					
1	6	02	2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	DinsosPM	0 orang					
1	6	02	2.03.	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	100 orang	99,836,740				
1	6	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terantar serta	DinsosPM	100 %	199,433,770				

					gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya								
1	6	04	2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	DinsosPM	335 Orang	177.453,130				
1	6	04	2.01.	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	200 Orang	50.000,000				
1	6	04	2.01.	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	DinsosPM	10 Orang	8,000,000				
1	6	04	2.01.	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	50 Orang	59.665,500				
1	6	04	2.01.	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	25 Orang	29.994,160				

1	6	04	2.01.	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	30 Orang	9.996.330					
1	6	04	2.01.	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	30 Orang	9.987.140					
1	6	04	2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	DinsosPM	100 %	21.980.640					
1	6	04	2.02.	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	2500 Orang	21.980.640					
1	6	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	DinsosPM	80 %	102.784.920					
1	6	05	2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	DinsosPM	12550 KPM	102.784.920					
1	6	05	2.02.	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	DinsosPM	10000 Orang	46.199.740					
1	6	05	2.02.	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan	DinsosPM	3073 Keluarga	36.600.000					

					Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	6	05	2.02.	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	DinsosPM	9460 Orang	19.985.180				
1	6	06			Program Penanganan Bencana	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	DinsosPM	100 %	50.000.000				
1	6	06	2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	DinsosPM	100 %	50.000.000				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	DinsosPM	298 Orang	50.000.000				
1	6	06	2.01.	01	Penyediaan Makanan		DinsosPM						
1	6	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	DinsosPM	100 %	76.950.555				
1	6	07	2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	DinsosPM	1 TMP	76.950.555				
1	6	07	2.01.	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam	DinsosPM	1 Makam	76.950.555				

						Pahlawan Kabupaten/ Kota								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DinsosPM			2.281.327.980				
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DinsosPM			2.281.327.980				
2	13	4				Program Administrasi Pemerintahan Desa	DinsosPM	Cepat Berkembang		43.885.970				
2	13	4	2.01.			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DinsosPM	20 kelurahan		43.885.970				
2	13	4	2.01.	18		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DinsosPM	2 Dokumen		43.885.970				
2	13	5				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DinsosPM	100 %		2.237.442.010				
2	13	5	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	DinsosPM	76 Lembaga		2.237.442.010				

					yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Din sos PM	76 Lembaga	284.689.070										
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Din sos PM	25 Unit	865.000.000										
2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Din sos PM	1 Dokumen	25.000.000										

2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DinsosPM	1 Laporan	62.752.940					
2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DinsosPM	25 Dokumen	1.000.000.000					
J U M L A H									6.736.773.965					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2024. Rancangan awal Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2024.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam **tabel 8** sebagai berikut :

Tabel 8
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Output/Outcome	Target Kinerja Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
						Target	Rp	
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	3.926.440.000	DinsosPM / Umum Kepegawai an
		01	2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	0 Dokumen		
		01	2.01.	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		
		01	2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.435.721.000	
		01	2.02.	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/Bulan	3,379,675,000	
		01	2.02.	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	56,046,000	
		01	2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	90.019.000	
		01	2.06.	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	
		01	2.06.	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	48,919,000	
		01	2.06.	05 Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	2 Paket	17.600.000	

					Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan			
		0 1	2.0 6.	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	21,000,000	
		0 1	2.0 7.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 Jenis	35,000,000	
		0 1	2.0 7.	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35,000,000	
		0 1	2.0 8.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	93.700.000	
		0 1	2.0 8.	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,800,000	
		0 1	2.0 8.	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.900.000	
		0 1	2.0 9.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	272.000.000	
		0 1	2.0 9.	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3,000,000	
		0 1	2.0 9.	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	59.000.000	
		0 1	2.0 9.	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10,000,000	
		0 1	2.0 9.	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
		0 2			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan	100 %	99.836.740	DinsosPM / Bidang Pemberdayaan sosial

					kesejahteraan sosial			
		0 2	2.0 2.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 Izin	
		0 2	2.0 2.	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen	
		0 2	2.0 3.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	0 orang	
		0 2	2.0 3.	0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	99.836.740
		0 4	Program Rehabilitasi Sosial			Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	199.433.770
		0 4	2.0 1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	335 Orang	177.453.130
		0 4	2.0 1.	0 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50,000,000
		0 4	2.0 1.	0 1	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10 Orang	8,000,000

		0 4	2.0 1.	0 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	59.665.500	
		0 4	2.0 1.	0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	29.994.160	
		0 4	2.0 1.	0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.996.330	
		0 4	2.0 1.	1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.987.140	
		0 4	2.0 1.	1 2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10 Orang	9.810.000,00	
		0 4	2.0 2.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	21.980.640	
		0 4	2.0 2.	0 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	21.980.640	
		0 5			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	80 %	102.784.920	
		0 5	2.0 2.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	102.784.920	
		0 5	2.0 2.	0 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	46.199.740	

		0 5	2.0 2.	0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3073 Keluarga	36.600.000	
		0 5	2.0 2.	0 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460 Orang	19.985.180	
		0 6	Program Penanganan Bencana			Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100 %	50,000,000	
		0 6	2.0 1.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %	50,000,000	
		0 6	2.0 1.	0 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	50,000,000	
		0 7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	76.950.555	
		0 7	2.0 1.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	76.950.555	
		0 7	2.0 1.	0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	76.950.555	
		4	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Kategori kelurahan	Cepat Berkembang	43.885.970	
		4	2.0 1.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 kelurahan	43.885.970	
		4	2.0 1.	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba	2 Dokumen	43.885.970	

						Desa dan Kelurahan			
		5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %	2.237.442.010	
		5	2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	2.237.442.010	
		5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	284.689.070	
		5	2.0 1	0 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	865.000.000	
		5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25,000,000	
		5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	62.752.940	
		5	2.0 1	0 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	25 Dokumen	1.000.000.000	

					dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
					J U M L A H			6.736.773.96 5,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi Kepala Daerah Periode 2019-2024 yaitu ” **Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City** ”.

Tarakan, Juni 2023

Kepala Dinas



A R B A I N, SE, M. AP

PEMBINA UTAMA MUDA / IVc

NIP. 19660616 199803 1 006